

PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH DAN SWASTA TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2002-2011



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh
ARIF JATMIKO
NIM. 10700109006

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juli 2013

Penyusun,

Arif Jatmiko

NIM. 10700109006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar Periode Tahun 2002-2011*", yang disusun oleh **ARIF JATMIKO**, NIM. 10700109006, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2013 M, bertepatan dengan 21 Syawal 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 September 2013 M
03 Dzulqaidah 1434 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. DR. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: DR. Muslimin., M.Ag	(.....)
Penguji I	: Prof. DR. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Eka Suhartini, SE., MM	(.....)
Pembimbing I	: DR. H. Kasjim Salenda., M.Th.i	(.....)
Pembimbing II	: Hasbiullah, SE., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kejahiliyaan menuju alam kedamaian.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa literatur dan data yang disajikan masih minim jumlahnya, karena keterbatasan dana dan waktu. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan koreksi, saran, dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga patut kiranya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Giyono, Ibunda Marmini, saudara dan sanak keluarga yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materil maupun moril, dan doa yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang dengan wibawanya selalu merespon mahasiswa/mahasiswi dalam berbagai kegiatan positif.
4. Bapak Dr. Amiruddin K., S.Ag., M.Ei dan Dr. Siradjuddin, SE., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.
5. Bapak Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.i dan Bapak Hasbiullah., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh keikhlasan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh tenaga Dosen khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan dengan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis. Dan seluruh staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu setia dalam pelayanan akademik.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Ekonomi angkatan 2009 yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan momen-momen yang berkesan yang telah kalian berikan. Kitalah yang terbaik.
8. KKN Angkatan 48 Kec. Galesong Desa Parambambe yakni, Eka Cahya Sari Putra, S.Pd, Ahmad Zulkibri, SH, Nur Hadijah, S.Sos, Nur Rahayu, S.Kep, dan Nuralam Syamsul, S.Pd yang telah memberikan saran-saran yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman D'blovers dan Ambalan Rangers Candidate Troops (RCT) yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun doa. penulis ucapkan banyak terima kasih.

10. Terkhusus buat Nirmawati Napoleon, Amd.Kep yang tulus dan ikhlas menemani dalam suka maupun duka agar skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya secara satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah, penulis memohon doa dan Rahmat-Nya, semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala dan berkah disisi-Nya agar kiranya dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi yang telah membaca isi skripsi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Karena menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, baik dari redaksi kata-kata maupun yang lainnya yang tidak berkenan dihati. Sesungguhnya kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Illahi Rabbi.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 10 September 2013

Penyusun,

Arif Jatmiko
NIM. 10700109006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10-40
A. Tinjauan Umum Tentang Kesempatan Kerja	10
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi	19
C. Tinjauan Umum Tentang Investasi Pemerintah	24
D. Tinjauan Umum Tentang Investasi Swasta	30
E. Hubungan Investasi Pemerintah dengan Kesempatan kerja	34
F. Hubungan Investasi Swasta dengan Investasi Swasta	35
G. Kerangka Pikir	35
H. Hipotesis	36
I. Defenisi operasional	37
J. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41-46
A. Jenis penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47-68
A. Gambaran Umum Kota Makassar	47

	B. Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar Periode 2002-2011	56
BAB	V PENUTUP	70-71
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia	2
Tabel 1.2	Perkembangan Kesempatan Kerja Kota Makassar	5
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar	49
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2002-2011	50
Tabel 4.3	Struktur Ekonomi Kota Makassar 2007-2011	51
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Berdasarkan PDRB Harga Konstan Tahun 2001-2010	52
Tabel 4.5	Data Kesempatan Kerja Kota Makassar Periode Tahun 2002-2011	53
Tabel 4.6	Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar Tahun 2002-2011	55
Tabel 4.7	Realisasi Investasi Swasta Di Kota Makassar 2002-2011	56
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Bebas	59
Tabel 4.9	Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi berganda	61

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1	Grafik Uji Normalitas	57
Gambar 4.2	Grafik Uji Heteroskedastisitas	60

ABSTRAK

Nama : Arif Jatmiko

Nim : 10700109006

Judul Skripsi : “Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar Periode Tahun 2002-2011”

Skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap kesempatan kerja. Peningkatan Investasi baik pemerintah maupun swasta merupakan hal yang amat penting bagi terciptanya kesempatan kerja. Ketersediaan jumlah kesempatan kerja akan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Orientasi pada penelitian ini mengarah pada pengujian teori yang bersifat deskriptif-kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2002 sampai tahun 2011 dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program spss 17, diperoleh persamaan $Y = 8,942 + 0,305 \text{ Investasi pemerintah} + 0,037 \text{ Investasi swasta}$. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dengan nilai $F_{hitung} (13,830) > F_{tabel} (4,74)$ dengan Signifikan F sebesar 0.004 atau lebih kecil dari 0,0 (5%). Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai $t_{hitung} (3,195) > t_{tabel} (1,895)$ dan signifikansi 0,015 serta investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai $t_{hitung} (1,381) < t_{tabel} (1,895)$ dan signifikansi 0,210. Nilai R square sebesar 0,798 yang menunjukkan bahwa 79,8 persen variasi (naik turunnya) kesempatan kerja di Kota Makassar dipengaruhi oleh variasi faktor investasi pemerintah dan investasi swasta sedangkan sisanya sebesar 20,2 persen dipengaruhi oleh variabel di luar model.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar Periode Tahun 2002-2011*", yang disusun oleh **ARIF JATMIKO**, NIM. 10700109006, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2013 M, bertepatan dengan 21 Syawal 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 September 2013 M
04 Dzulqaidah 1434 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muslimin., M.Ag	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Eka Suhartini, SE., MM	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Kasjim Salenda., M.Th.i	(.....)
Pembimbing II	: Hasbiullah, SE., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan tantangan perekonomian bagi setiap negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga kesektor lain tak terkecuali dimasalah ketenagakerjaan. Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk.¹

Pembangunan ekonomi memiliki arti luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan.²

Kesempatan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Walaupun mungkin intensitas dari masalah tersebut mungkin sekali berbeda karena

¹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 68.

²Todaro, *Pembangunan ekonomi di Dunia ketiga* (Cet. 6; Jakarta: Erlangga, 2000), h. 10.

adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah.³

Kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama 3 dekade yang lalu (1970-2000) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk dari 2,3 persen pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,4 persen per tahun pada periode 1990 sampai 2000. Namun daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk menghadapi tantangan baru dimana peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk usia kerja akan berdampak pada tuntutan perluasan kesempatan kerja.⁴

Tabel 1.1 Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia

Periode	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Bekerja (juta)	pengangguran terbuka (Juta)	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)
2005	66,02	93,95	11,88	11,24
2006	66,12	95,45	10,93	10,28
2007	66,99	99,93	10,01	9,11
2008	67,18	102,55	9,39	8,39
2009	67,23	104,87	8,96	7,87
2010	67,72	108,20	8,31	7,14

sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)⁵

³Muammil Su'nan dan Endang Astuti, "Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat", h. 1.

⁴Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Cet. 1; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 337-338.

⁵Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional,, "Statistik Indonesia", http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=15 (5 Mei 2013).

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan tenaga kerja dalam kurun waktu 2005-2010, sekitar 2 sampai 4 juta orang, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu tersebut juga meningkat yang mencapai 67,72. Di lain sisi, pemerintah pun mampu menurunkan pengangguran terbuka menjadi sekitar 8,31 juta pada tahun 2010. Namun, yang harus diperhatikan yakni tingkat pengangguran terbuka, walaupun pemerintah mampu menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 7,14 pada tahun 2010 akan tetapi, Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari empat persen.⁶

Berkait angka pengangguran, keseharian orang merasakan semakin sulit mencari pekerjaan, seolah ada beda antara statistik yang disampaikan Presiden dengan realitas keseharian. Di tengah banyak perusahaan yang tutup, kelesuan produksi yang terjadi di mana-mana, ada *de-industrialisasi*, ada bencana alam, dan ada penurunan penjualan, agak aneh kalau angka pengangguran justru menurun. Penurunannya sangat signifikan.

Dalam kurun waktu 3-4 bulan (November 2005-Februari 2006) terjadi penurunan pengangguran sebanyak 0,8% dari total angkatan kerja (dari 11,2% menjadi 10,4%). Berarti dalam tempo tersebut ada pengurangan pengangguran atau penyerapan tenaga kerja baru sekitar 900 ribu orang. Jika ini betul, dan pola seperti ini terjadi, sebelum akhir masa kepresidenan SBY, tak ada lagi pengangguran di tanah air. Padahal, persoalan pengangguran merupakan

⁶Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses dan Masalah Dasar* (Cet. 1; Jakarta: LPFE-UI, 2000) h. 97.

masalah laten yang sudah muncul sejak zaman kolonial. Jadi perolehan angka ini perlu dijelaskan, apakah karena penggunaan definisi yang berbeda, karena data musiman (saat panen), atau hanya *otak-atik* berdasar berbagai asumsi yang harus dijelaskan.⁷

Melihat data statisistik Kota Makassar, perkembangan tingkat pengangguran pada tahun 2010 sekitar 8,37 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi kota makassar tahun 2010 sekitar 9,83 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar cenderung meningkat dalam beberapa tahun, namun peningkatan tersebut belum dibarengi dengan pengurangan laju pengangguran. Umumnya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi meningkat sehingga laju pengangguran menurun atau berkurang.⁸

Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidak seimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota

⁷Edy Suandi hamid, "*Kontroversi Angka Pengangguran dan Kemiskinan*". http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul42_1.htm (5 mei 2013).

⁸ Indra Oloan Nainggolan, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara" (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), h. 1.

mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.⁹

Tabel 2.1 Perkembangan Kesempatan Kerja Kota Makassar

Tahun	Kesempatan Kerja	Pertumbuhan (%)
2005	481.546	-
2006	400.980	-16.73
2007	431.981	7.73
2008	498.653	15.43
2009	522.462	4.77
2010	507.962	-2.77

Data di atas menunjukkan bahwa pada perkembangan Kesempatan kerja di Kota Makassar Pada tahun 2005, sebesar 481.546. Namun tahun 2006, terjadi penurunan sebesar 16,73% yaitu menjadi 400.980 orang. Pada tahun 2007, mengalami peningkatan menjadi 431.981 orang atau sebesar 7,73%. Tahun 2008 mengalami peningkatan cukup besar yakni 15,43% menjadi 498.653 orang. Tahun 2009, mengalami peningkatan sebesar 4,77% atau sebanyak 522.462 orang. Pada tahun 2010, terjadi penurunan sebesar 507.962 orang atau sebesar 2,77%. Perkembangan kesempatan kerja di kota Makassar di atas masih fluktuatif, hal itu di sebabkan karena gejolak ekonomi, politik, keamanan dan konflik sosial yang mempengaruhi kesempatan kerja.

Menurut teori ekonomi, terapi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang “berkualitas. Yang dimaksud pertumbuhan yang ekonomi yang berkualitas

⁹Todaro, *Op.cit.*, h. 12.

adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup besar.¹⁰

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran.¹¹

Selanjutnya dalam teori investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan dana yang bersumber dari masyarakat atau pemerintah untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya. Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing. Sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal.¹²

Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal atau pengeluaran pembangunan yang dianggarkan setiap tahunnya. Belanja modal pemerintah

¹⁰Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 362.

¹¹M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 339.

¹²Hendarmin, “ *Pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat*”, Jurnal Eksos, volume 8 No. 3, Oktober 2012, <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/> (di akses 15 Juni 2013).

secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat

Investasi swasta sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah dan penurunannya dapat berdampak serius. Hal ini disebabkan karena kalau investasi turun, maka kegiatan produksi pun akan ikut turun. Jika kegiatan produksi turun, dengan sendirinya output pun merosot, dan ini akan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Apabila hal ini terjadi maka pada gilirannya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan merosot.¹³

Melalui undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah adalah investasi. Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi selatan menjadi gerbang kawasan timur Indonesia. Memahami pentingnya investasi sektor swasta menuju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengembangkan sumber daya nasional.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka saya mengangkat sebuah judul “Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar periode 2002-2011”.

¹³ Try Wahyuningsih, “*Dampak investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku*”, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2129/ps> (diakses 15 Juni 2013).

¹⁴Pemerintah Kota Makassar, “*Investment Guidelines Kota Makassar*”, http://makassarkota.go.id/download/investment_guideline_makassar.pdf (1 mei 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik suatu permasalahan yakni, Bagaimana Pengaruh Investasi Pemerintah dan swasta terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011 baik secara simultan maupun parsial?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011 baik secara simultan maupun parsial.

Dan adapun manfaat penelitian, yakni:

1. Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk lebih mendalami masalah pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap kesempatan kerja khususnya di kota Makassar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang konsen terhadap hubungan antara investasi dan kesempatan kerja.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Kota Makassar khususnya pemerintah Kota Makassar.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai gambaran umum tentang pembahasan yang dirangkum dalam beberapa bagian bab dan diikuti

dengan beberapa uraian sub bab. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini diuraikan, sebagai berikut:

Pada Bab I, penulis mengemukakan unsur-unsur dalam penulisan skripsi yang dirangkum ke dalam bab pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis menjelaskan teori-teori yang relevan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengertian investasi pemerintah, investasi swasta, pengangguran, kesempatan kerja, kerangka pikir, rumusan hipotesis, definisi operasional dan penelitian terdahulu.

Pada Bab III, penulis menguraikan metodologi penelitian yang merupakan rancangan dasar dalam proses penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan serta teknik analisis data.

Pada Bab IV, penulis Pembahasan hasil penelitian menguraikan tentang gambaran umum mengenai pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap kesempatan kerja, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

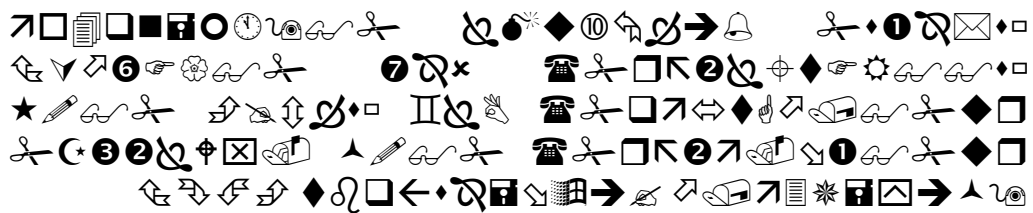
Pada Bab V, penulis mengakhiri pembahasan skripsi dengan menarik beberapa kesimpulan yang dihasilkan, dan saran-saran yang perlu diperhatikan secara seksama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kesempatan Kerja

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al- Ju'muah/ 62:10



Terjemahnya:

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹⁵

Ayat diatas (al jumu'ah ayat 10) merupakan perintah untuk bertebaran dimuka bumi (bekerja dan atau mencari penghidupan dan atau karunia) Perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan.

1. Pengertian Kesempatan Kerja dan Angkatan kerja

Kesempatan Kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang tersedia untuk angkatan kerja.¹⁶ Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 2009) h. 442.

¹⁶T.Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro* (Cet. 5; Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 207.

kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dan dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja.¹⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pasal (1) ayat (2), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁸ Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan adalah termasuk dalam sebutan angkatan kerja.¹⁹

¹⁷Indra Oloan Nainggolan,"Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara" (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), h. 26.

¹⁸Undang-undang RI No.13 tahun 2013, "tentang Ketenagakerjaan" [\(http://www.pemagangan.com/new/zregulasi/uu13-2003\(1\)\)](http://www.pemagangan.com/new/zregulasi/uu13-2003(1)) (1 mei 2013).

¹⁹Sonny Sumarsono, *op.cit.*, h. 7.

Tenaga kerja (*man power*) mengandung dua pengertian. Pertama, tenaga kerja mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.²⁰ Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Untuk di Indonesia, pada periode pencacahan sebelum tahun 2000, digunakan batasan usia 10 tahun ke atas. Indonesia baru menggunakan konsep 15 tahun ke atas mulai tahun 2000, yang disebabkan adanya Program Wajib Belajar 9 tahun. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.²¹

Penduduk yang digolongkan mencari pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang pernah bekerja tetapi menganggur dan sedang mencari pekerjaan dan mereka yang sedang bebas tugasnya dan sedang mencari pekerjaannya.

²⁰Mulyadi.s, *Ekonomi sumber daya Manusia dalam Perspektif pembangunan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 60.

²¹Sonny Sumarsono, *op.cit.*, h. 7.

Selain itu, Angkatan kerja yang digolongkan bekerja juga dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Mereka yang bekerja selama seminggu melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari.
- b. Mereka yang selama seminggu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja dibidang keahliannya seperti, dokter, tukang cukur dan lain-lainnya serta pekerjaannya tetap, seperti pegawai pemerintahan atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena sakit, cuti, mogok dan sebagainya.²²

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat di dalam kegiatan produktif yaitu yang memproduksi barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a. Golongan yang masih bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah atau menuntut ilmu di sekolah.
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
- c. Golongan lain-lain, yang digolongkan disini adalah Penerima pendapatan yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh

²²*Ibid.*

pendapatan, seperti bunga simpanan, hasil sewa atau milik dan Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.

Pendekatan *Labor utilization approach* (penggunaan tenaga kerja) menitikberatkan pada seseorang apakah dia cukup dimanfaatkan dalam bekerja (*under utilized*). Pendekatan ini menitikberatkan pada seseorang apakah dia cukup dimanfaatkan dalam kerja dilihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang diperoleh. Dalam pendekatan ini angkatan kerja dikelompokkan dibedakan 3 golongan yaitu:

- a. Pengangguran (*open unemployed*), yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja.
- b. Setengah menganggur (*under employed*), mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan.
- c. Bekerja penuh, yaitu orang yang memanfaatkan jam kerja secara penuh dalam pekerjaannya, kurang lebih 8 jam sampai 10 jam per hari.²³

2. Konsep Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak Negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi

²³*Ibid.*

masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Namun, kebijakan pemecahannya sudah barang tentu harus dialamatkan kepada apa yang menjadi penyebabnya.²⁴

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan oleh dalam perdebatan politik dan para politisi yang mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja baru.²⁵

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha dapat menjual barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi.

Semakin besar permintaan, semakin besar juga barang yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat perhubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.²⁶

135. ²⁴Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Cet. 1; jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.

²⁵Gregory Mankiew N, *Makroekonomi* (cet. 6; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 154.

²⁶Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 13.

Dilihat dari sebab-sebab timbulnya pengangguran dapat dibagi menjadi:

- a. Pengangguran friksional atau transisi (*frictional or transitional unemployment*) adalah jenis pengangguran yang timbul akibat dari perubahan di dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan dinamika atau perkembangan ekonomi yang terjadi.
- b. Pengangguran structural (*structural unemployment*) adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.
- c. Pengangguran alamiah (*natural unemployment*) atau lebih dikenal dengan istilah tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan sama dengan tingkat inflasi aktual.
- d. Pengangguran konjungtur atau siklis (*cyclical unemployment*) adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat merosotnya kegiatan ekonomi.²⁷

Adapun jenis-jenis pengangguran di Negara sedang berkembang adalah:

- a. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yang terjadi akibat di dalam perekonomian adanya kelebihan tenaga kerja sehingga sering disebut pengangguran tak kentara.

²⁷Sonny Sumarsono, *op.cit*, h. 259-260.

- b. Pengangguran musiman (*season unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu pada satu tahun.
- c. Setengah pengangguran (*under unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi akibat kelebihan penduduk disektor-sektor tertentu pada Negara sedang berkembang sehingga banyak penduduknya yang kurang mendapat pekerjaan dan bekerja diwaktu-waktu tertentu seperti harian, mingguan, atau musiman.

Selain itu, Dampak yang ditimbulkan akibat pengangguran adalah sebagai berikut:

- a. Dampak pengangguran terhadap perekonomian

Tingkat pengangguran yang tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang mantap. Akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang dicapai, karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang sehingga akan menghambat pembangunan.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan perekonomian karena menyebabkan perusahaan kehilangan keuntungan dan tidak akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi.²⁸

²⁸ *Ibid.*

b. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Selain berdampak buruk terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak buruk terhadap individu dan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pengangguran menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan.
- 2) Pengangguran menyebabkan hilangnya keterampilan.
- 3) Pengangguran menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

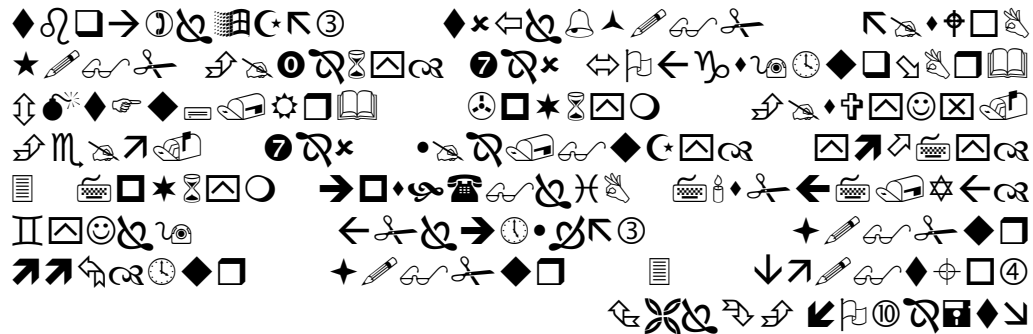
Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran, maka perlu diterapkan kebijakan untuk mengatasi pengangguran. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi pengangguran yaitu:

- a. Memperbaiki sistem informasi sehingga dapat mempercepat pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
- b. Dengan meringankan tarif pajak, sehingga akan memotivasi investasi.
- c. Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para penganggur.
- d. Adanya program transmigrasi, sehingga penyebaran penduduk menjadi lebih merata.
- e. Mengembangkan usaha di sektor informal.²⁹

²⁹*Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Investasi

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2: 261.



Terjemahnya:

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”³⁰

Ayat diatas dapat merupakan contoh kongkrit bagi kita untuk berinvestasi yang dimulai dengan *habatin wahidatin* (sebutir benih) menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Nampaknya Al-qur'an telah memeberikan panduan investasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq). bila banyak orang yang melakukan infaq maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk dapat berproduktifitas ke arah yang lebih baik. Nampaknya *multiplier effect* dari infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi *dunyawiyah*.

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinventasi harta yang dimiliki menjadi lebih

³⁰Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.,cit, h. 34.

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, investasi dalam Islam sangat penting bagi kepentingan dunia maupun akhirat.³¹

1. Konsep Investasi

Dalam bahasa Inggris, kata *Investment* di terjemahkan sebagai investasi ini kedalam bahasa Indonesia, yaitu penanaman modal.³² Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah pembentukan modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

³¹Indah Yuliana, “*Investasi dalam perspektif Islam*”, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/309/ps_196 (10 mei 2013).

³²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Cet. 8; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 184.

Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.³³

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dan meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal, yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/pengeluaran :

- a. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk industri.
- b. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
- c. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir satu tahun perhitungan pendapatan nasional.

³³Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 121.

Penanam-penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

- a. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
- b. Suku bunga.
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
- d. Kemajuan teknologi.
- e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
- f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.³⁴

Disamping itu kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian, yakni:

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.

³⁴*Ibid.*

- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional serta kesempatan kerja.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.³⁵

Suatu iklim investasi (infrastruktur) yang baik maka akan semakin menarik daerah tersebut untuk dijadikan investasi bagi perusahaan-perusahaan swasta, dari para petani dan wirausahawan mikro sampai dengan perusahaan manufaktur lokal dan perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan investasi pada gagasan-gagasan serta fasilitas-fasilitas baru yang memperkuat fondasi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.³⁶

2. Jenis-jenis Investasi

Menurut jenisnya investasi dibagi menjadi delapan jenis yang dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. *Autonomous investment* dan *induced investment*. Yaitu *Autonomous investment* adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, Sedangkan *induced investment* adalah investasi yang sangat dipengaruhi tingkat pendapatan.

³⁵Hadi Sasana, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Jawa tengah,” *JEJAK*, vol. 1 no. 1 (September 2008), h. 3.<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/download/1445/1571> (Diakses 6 April 2013).

³⁶The world bank, *World Development Report: A Better Investment Climate for Everyone* (Washington DC: Oxford University Press), h. 2.

- b. *Public Investment* dan *Private Investment*. Yaitu, *Public Investment* adalah investasi penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu *Private Investment* adalah kebalikannya, yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta.
- c. *Domestic Investment* dan *Foreign Investment*. yaitu, *Domestic* artinya dalam negeri, sedangkan *foreign* adalah luar negeri. Dengan itu di jelaskan bahwa *domestic investment* adalah penanaman modal dalam negeri dan *foreign investment* adalah penanaman modal asing.
- d. *Gross Investment* dan *Net Investment*. Yaitu, *Gross investment* adalah jenis investasi yang dilaksanakan di suatu Negara, dengan tidak peduli jenis investasi apa sajakah yang dilaksanakan. Sedangkan *net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi bruto Rp.25 juta, sedangkan penyusutan Rp.10 juta maka net investment sebesar Rp.15 juta.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Investasi Pemerintah

1. Konsep Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.³⁸ Peranan pemerintah dalam suatu Negara dapat dilihat

³⁷Suherman Rosyidi, *Op.cit.*, h. 188-191.

³⁸Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2008 Tentang, "*Investasi Pemerintah*", <http://www.setjen.depkeu.go.id/detail.php?module=layanan&act=investasi&div=dasar>, (3 mei 2013).

dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pembangunan. Dengan kata lain investasi pemerintah sama halnya dengan pengeluaran pemerintah.³⁹

Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal atau pengeluaran pembangunan yang dianggarkan setiap tahunnya. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.⁴⁰

Jumlah pengeluaran pemerintah dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah :

- a. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Biasanya besarnya pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam RAPBN didasarkan pada berapa besarnya proyeksi pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah yang berasal dari masyarakat. Semakin besar proyeksinya maka semakin besar pula rencana pengeluarannya (biasanya diwujudkan dalam bentuk kenaikan gaji PNS dan pensiunan pegawai negeri). Sebaliknya penerimaan tetap atau bukan menurun maka kemungkinan besar pemerintah akan melakukan kebijakan kontraksi.

³⁹M.Suparmoko dan Irawan, *Pengantar Ekonomi Makro* (Cet.1; Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002) h. 94.

⁴⁰Try Wahyuningsih, *op.cit.*, h. 4.

- b. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Beberapa tugas pemerintah yang relatif sangat berat dan sulit adalah bagaimana mengendalikan tingkat inflasi dan mengatasi tingkat pengangguran yang semakin membesar setiap periodenya. Pemerintah bisa saja melakukan kebijakan belanja Negara yang lebih besar dari pada penerimaannya bila dalam kebijakannya bertujuan untuk mengatasi pengangguran yang semakin besar dengan cara membiayai pembangunan infrastruktur dengan proyek padat karya, membangun sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lain sebagainya.
- c. Pertimbangan politik dan keamanan. Dalam hal ini tentu saja berhubungan dengan alat alat keamanan Negara.⁴¹

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi Negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas Negara, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesempatan kerja.

Untuk itu jika pengeluaran pemerintah mampu menjadi pemandu peningkatan ekonomi Negara, maka peningkatan pada pengeluaran pemerintah akan meningkatkan aktifitas perekonomian dengan adanya peningkatan investasi. Peningkatan investasi tersebut akan memiliki dampak

⁴¹Iskandar Putong dan Nuring Indah Andjaswa, *Pengantar ekonomi makro* (Cet. 2; Jakarta: Mitra wacana media. 2010) h. 101-102.

pula pada peningkatan output, kesempatan kerja, ekspor, pajak, dan penerimaan pemerintah.⁴²

2. Teori pengeluaran pemerintah

a. Teori Rostow dan Musgrave

Dalam teori ini menghubungkan antara pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan tahap-tahap dalam pembangunan ekonomi yakni tahap awal, tahap tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal investasi pemerintah harus lebih besar dari total investasi karena pada tahap ini banyak sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah seperti sekolah, jalan, kesehatan, sarana transportasi. Pada tahap menengah ini, investasi pemerintah tetap dibutuhkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada tahap ini jumlah investasi swasta semakin besar karena peran swasta semakin besar akan menyebabkan kegagalan pasar. Maka pemerintah harus banyak menyediakan sarana dan prasarana publik yang lebih besar.

Pada tahap menengah perkembangan ekonomi juga mengakibatkan hubungan antar sektor semakin beragam. Banyaknya eksternalitas negatif menuntut pemerintah untuk turun tangan seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri-industri membuat pemerintah harus turun langsung. Selain itu pemerintah juga harus

⁴²Eddy Wibowo Chandra, “Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010”. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/147/113> (5 mei 2013).

melindungi kesejahteraan dari buruh yang berada dalam posisi lemah. Sedangkan pada tahap lanjut menurut Rostow, pemerintah lebih pada aktivitas menyediakan pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial seperti pelayanan kesehatan masyarakat.⁴³

b. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan pengeluaran pemerintah” Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya tetapi masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai aktivitasnya sehingga masyarakat secara sukarela membayar pajak.⁴⁴

3. Jenis-jenis pengeluaran Pemerintah

Dalam sistem dual budgeting, pengeluaran pemerintah dibedakan atas dua, yaitu :

⁴³Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik* (Cet. 3; Jakarta: BPFE UGM, 2008) h. 75.

⁴⁴*Ibid.*

- a. Pengeluaran rutin, dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah yang terdiri dari, belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsid dan pengeluaran rutin lainnya.
- b. Pengeluaran pembangunan, merupakan pengeluaran Negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional baik berupa fisik maupun non fisik

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 tahun 2003, sistem penganggaran mengacu pada praktik-praktik yang berlaku secara internasional, Menurut GFS (*Government Financial Statistics*) manual 2001, sistem penganggaran belanja Negara secara implicit menggunakan sistem unified budget, dimana tidak ada pemisah antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja Negara menurut klasifikasi ekonomi di kelompokkan ke dalam:

- a. Kompensasi untuk pegawai.
- b. Penggunaan barang dan jasa.
- c. Kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah.
- d. Bunga utang.
- e. Subsidi.
- f. Hibah.

- g. Tunjangan social (social benefits) dan
- h. Pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Investasi Swasta

1. Konsep Investasi Swasta

Investasi swasta/penanaman modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dari pengertian diatas, disebutkan bahwa investasi swasta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).⁴⁶

Banyak harapan digantungkan dengan dikeluarkannya undang-undang penanaman modal khususnya peningkatan investasi dan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pasal 3 ayat (2) telah ditentukan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, diantaranya:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

⁴⁵Anggito Abimanyu, *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal* (Cet.1; jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2011), h. 146-147.

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC759858774DF852/17683/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf> (4 mei 2013).

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Bila ditelusuri, semangat filosofis pemerintah mengundang masuknya modal asing, tampak jelas dan dimuat dalam landasan pemikiran undang-undang penanaman modal, yaitu:

- a. Indonesia tidak memiliki modal dan sumber pembiayaan lain yang cukup untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional.
- b. Pemerintah mengakui bahwa jalan menuju peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan hanyalah dengan akumulasi modal asing.
- c. Pembentukan dan akumulasi modal asing akan tercapai jika ada landasan hukum yang mantap untuk menjamin proses kelangsungan penanaman modal asing.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan penanaman modal dalam negeri dengan melakukan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman

⁴⁷Lusiana, *Usaha Penanaman modal di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 9.

modal di wilayah Negara republik Indonesia. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki Negara republik Indonesia. Perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

3. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri.

Penanaman modal asing mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan menciptakan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Peningkatan penanaman modal dapat menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia adalah tuntutan keadaan, baik ekonomi maupun politik Indonesia.⁴⁸

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara Garis besar pemikiran mereka sebagai berikut:

⁴⁸*Ibid.*

1. sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan.
3. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural.
4. Kebutuhan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.⁴⁹

Beberapa langkah untuk mendorong arus modal asing swasta ke Negara terbelakang, adalah:

- a. Stabilitas politik dan keamanan harta dan jiwa di Negara peminjam modal adalah syarat pertama terciptanya iklim yang menguntungkan bagi pemasukan investasi.
- b. Pemerintah Negara terbelakang harus memberikan informasi kepada perusahaan asing mengenai ruang lingkungan kesempatan investasi.
- c. Pemerintah Negara peminjam modal bisa menurunkan biaya produksi perusahaan asing dengan menyediakan fasilitas dasar yang memadai (misalnya transportasi, tenaga, pekerjaan umum dan sebagainya) didalam negeri itu.⁵⁰

Selain itu, Penanaman modal asing swasta terbagi menjadi dua, yakni:

⁴⁹Chenery Hoolis B dan Nicholas G Carter, *“Foreign Assistance and Development Performance 1960-1970”*, American Economic Review, vol. 63 no. 2 Mei,(1973) h. 34.

⁵⁰M.L Jhingan, *op.cit.*, h. 499-500.

- a. Penanaman modal asing swasta langsung yang dilakukan oleh pihak swasta yakni dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan , membuka pabrik –pabrik , menjalankan mesin-mesin , membeli bahan baku dsb.
- b. Penanaman modal asing portofolio yakni dana investasinya tidak diwujudkan langsung sebagai alat produksi melainkan ditanamkan pada pasar pasar modal dan kredit oleh lembaga swasta (bank, reksadana, perusahaan) atau individu di Negara Negara berkembang dalam aneka bentuk instrument keuangan seperti saham , obligasi , sertifikat deposito , surat promes investasi dsb.⁵¹

E. Hubungan Investasi Pemerintah dengan Kesempatan Kerja

Pemerintah dapat juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja secara langsung dengan mengalokasikan lebih banyak pengeluaran pada pembangunan infrastruktur yang telah rusak. Kebijakan ini sekaligus meningkatkan iklim investasi, yang akan mendorong investor swasta menciptakan lapangan pekerjaan. Lebih lanjut, pemerintah masih dapat mengontrol pengeluarannya dengan memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Ini memerlukan upaya dari pemerintah untuk memformulasikan kebijakan di bidang infrastruktur, yang dapat menggerakkan investasi namun meminimalisir resiko terhadap anggaran. Hal serupa juga dapat ditempuh oleh pemerintah dengan meningkatkan skala

⁵¹Michael P. Todaro,dan Stephen C. Smith, *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (Cet. 8; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003) h. 122.

dari sejumlah program yang memiliki efek besar terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.

F. Hubungan Investasi Swasta dengan Kesempatan Kerja

Kian disadari oleh Negara berkembang bahwa penanaman modal asing dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi. Penanaman modal asing akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan ekonomi dan kemudian meningkatkan kesempatan kerja. Penanaman modal langsung bukan saja menyediakan dana modal dan mata uang asing yang diperlukan untuk penanaman modal, tetapi juga membawa tenaga manajemen, entrepreneur, keahlian teknik, dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dari barang-barang yang dihasilkan.

Dalam jangka panjang penanaman modal langsung dapat melatih golongan pribumi mendapatkan keahlian di bidang-bidang yang diusahakan pemodal asing. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing dapat mempercepat alih teknologi baru ke Negara berkembang.⁵²

G. Kerangka Pikir

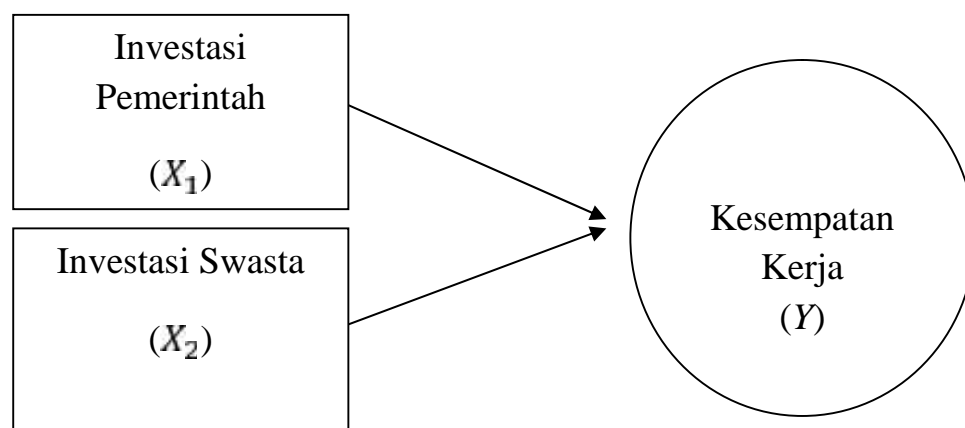
Makassar dikenal sebagai Ibukota Propinsi memiliki basis ekonomi dan sumber daya yang relatif lebih baik, infrastruktur yang memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang melebihi daerah lain di kawasan timur Indonesia. Letaknya yang strategis di selat Makassar menjadikannya suatu keuntungan bagi investor sekaligus sebagai pintu gerbang timur Indonesia

⁵²Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 328.

Namun, ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi masalah di kota Makassar. Terbukti di tahun 2011, tingkat pengangguran mencapai 8%. Ada kecenderungan hal ini disebabkan karna melorotnya investasi di Makassar yang berdampak pada terbatasnya penyediaan tenaga kerja

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara atau daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi karena kegiatan investasi merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu kesempatan kerja.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Keterangan

□ : Variabel Bebas (Independent)

○ : Variabel Terikat (Dependent)

→ : Arah Hubungan

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka

hipotesis yakni, Diduga ada Pengaruh signifikan Investasi Pemerintah dan swasta terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011 baik secara simultan maupun parsial.

I. Defenisi Operasional

Operasionalisasi penelitian ini dibagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel independent dan variabel dependent, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel independent

Variabel independent adalah variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependent (variabel tak bebas). Variabel independent dalam penelitian ini adalah investasi pemerintah (X_1) dan Investasi Swasta (X_2).

a. Investasi pemerintah (X_1) adalah penempatan sejumlah dana atau pengeluaran oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah dalam APBD tercermin dalam belanja modal pemerintah.

b. Investasi Swasta (X_2) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

2. Variabel Dependent

Variabel Dependent adalah variabel tak bebas yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel Dependent dalam penelitian ini adalah Kesempatan kerja (Y). Kesempatan kerja adalah

banyaknya lapangan kerja yang terisi, tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja

J. Penelitian Terdahulu

1. Magnus Blomstrom, Robert E Lipsey, M. Zejan (1993) dalam penelitiannya berjudul “Is Fixed Investment The Key To Economic Growth” menyimpulkan bahwa Penanaman modal Asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika Negara tersebut benar- benar kaya.⁵³
2. Simon Tomam M (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh PDRB, Inflasi dan Investasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara*” menyimpulkan bahwa variabel PDRB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara sedangkan tingkat inflasi dan Investasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara. Akan tetapi, secara bersama-sama variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara. Dengan demikian pihak pemerintah perlu meningkatkan akses agar investor menanamkan modalnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kesempatan kerja di Sumatera Utara. Dan pemerintah juga perlu menekan tingkat inflasi dan peningkatan PDRB untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.⁵⁴
3. Edyan Rachman dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Di DKI Jakarta” menyimpulkan

⁵³Magnus Blostrom, Robert E Lipsey dan M. Zejan, “ *Is Fixed Investment The Key To Economic Growth*” (massachusetts: Avenue Cambridge, 1993), h. 44.

⁵⁴Simon Tomam M “ *Pengaruh PDRB, Inflasi dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Utara*”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26484/4/Chapter%20II.pdf> (6 Mei 2013).

bahwa variabel PDRB, Investasi, UMP, dan Angkatan Kerja bersama-sama berpengaruh terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta. Namun, apabila dilihat secara parsial, variabel investasi tidak sesuai dengan hipotesis, dimana hasil analisisnya menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja. Ketidaksesuaian ini diantaranya disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor-sektor ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Sedangkan hasil analisis dari variabel PDRB, Angkatan Kerja, dan UMP sesuai dengan hipotesis dimana PDRB berpengaruh positif, Angkatan Kerja berpengaruh positif, dan UMP berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta.⁵⁵

4. Hendarmin dalam penelitiannya berjudul “ Pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat” menyimpulkan bahwa Terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya variabel investasi swasta yang memiliki pengaruh signifikan namun koefisiennya berslope negatif (bertolak belakang dengan teori ekonomi), sementara variabel belanja modal pemerintah daerah walaupun memiliki slope positif (sesuai dengan teori ekonomi) namun tidak signifikan. Terhadap kesempatan kerja, hanya variabel belanja modal yang memiliki pengaruh signifikan dan memiliki koefisien yang positif (sesuai teori), sementara variabel investasi swasta walaupun memiliki slope positif (sesuai teori) namun tidak signifikan. Terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh

⁵⁵Edyan Rachman, “*Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Di DKI Jakarta*” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4100/1/05011102.pdf> (4 Juli 2013)

belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kedua variabel pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun slope dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif (tidak sesuai teori).⁵⁶

5. Tri Wahyuningsih dalam penelitiannya berjudul “Dampak investasi pemerintah dan swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku” menyimpulkan bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

⁵⁶Hendarmin, *op.cit.*, h. 13.

⁵⁷Try Wahyuningsih, *op.cit.*, h. 21.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif-kuantitatif, yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar Periode 2002-2011 yang akan diuji secara empiris.⁵⁸

Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial.

Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu (*Time series*), dimana data yang dikumpulkan dihitung berdasarkan data sepuluh tahun terakhir (tahun 2002 sampai 2011).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Makassar sebagai objek penelitian dengan menetapkan data Investasi Pemerintah dan Kesempatan

⁵⁸Muhammad Arif Tiro, *Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Cet.I; Makassar: Andira Publisher, 2009), h. 123.

Kerja yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Haji Bau No. 6 Makassar dan data Investasi Swasta yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag dan penanaman modal) Kota Makassar yang berlokasi di jl. Rappocini Raya No. 219 Makassar. Waktu penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 25 juni sampai dengan 25 juli 2013.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data yang menyangkut tentang Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan kesempatan kerja yang di peroleh dari BPS maupun instansi-instansi yang terkait

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah Data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu segala bentuk data yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) baik berupa majalah, jurnal, artikel maupun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena data dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data ditentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin di pecahkan. Jadi pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penulis melakukan

tinjauan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data konkrit yang berkaitan dengan skripsi ini guna dijadikan sebagai bahan penulisan,

Data dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, neraca atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai Investasi pemerintah, Investasi swasta dan Kesempatan kerja dari tahun 2002 sampai 2011.

E. Teknik Analisis Data

Adapun model yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kedua variabel tersebut, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Kesempatan Kerja pada tahun sebelumnya maka digunakan metode *lag*. Sehingga Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta sebagai variabel-variabel independen yang mempengaruhi Kesempatan Kerja kota Makassar sebagai variabel dependen dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y=f(X_1, X_2).....(1)$$

Dengan model analisis:

$$Y= 0 + 1X_1+ 2X_2+\mu(2)$$

Kemudian persamaan di atas dilinearkan dengan persamaan semilogarithmic, yaitu:

$$\text{Ln}Y= 0 + 1 \text{Ln } X_1+ 2 \text{Ln } X_2+\mu(3)$$

Dimana:

Y = Kesempatan Kerja

X_1 = Investasi Pemerintah

X_2 = Investasi Swasta

0 = koefisien konstanta

$1, 2$ = koefisien regresi

μ = error term

Sebelum analisis regresi digunakan, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji Asumsi Klasik untuk selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 17.

a. Uji F (Simultan)

Statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0: \beta_1, \beta_2 = 0$ semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

$H_1: \beta_1, \beta_2 \neq 0$ semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau jika probabilitas $F_{hitung} > \text{tingkat signifikansi } 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau jika probabilitas $F_{hitung} < \text{tingkat signifikansi } 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

b. Uji T (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel bebas secara individual atau parsial terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Pada pengujian hipotesis, nilai t-hitung harus dibandingkan dengan t-tabel pada derajat keyakinan tertentu. Nilai t-hitung diperoleh dengan formulasi.

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut

a. Investasi Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja

$H_0 : \beta_1 > 0$ tidak ada pengaruh antara investasi pemerintah dengan Kesempatan kerja

$H_1 : \beta_1 < 0$ ada pengaruh antara investasi pemerintah dengan kesempatan kerja

b. Investasi swasta terhadap kesempatan kerja

$H_0 : \beta_2 < 0$ tidak ada pengaruh investasi swasta dengan kesempatan kerja

$H_1 : \beta_2 > 0$ ada pengaruh investasi swasta terhadap kesempatan kerja

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau jika probabilitas $t_{hitung} > \text{tingkat signifikansi } 0,05$, artinya adalah salah satu variable independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau jika probabilitas $t_{hitung} < \text{tingkat signifikansi } 0,05$, artinya adalah salah satu variable independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara antara 119:18'38" sampai 119:32'31" Bujur Timur dan antara 5:30'30" sampai 5:14'49" Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km². Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 Km², dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0: sampai 9:.. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2: (datar) dan kemiringan lahan 3-15: (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
2. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Sebagai Kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah Timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah Selatan ke utara merupakan koridor utama Kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar.

Sejalan dengan perkembangannya saat ini dinamika pengembangan wilayah dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan

Kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya pada satu ruang tertentu saja.

Kota Makassar Secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan yakni

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar (dalam Persen)

Kode Wil	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase terhadap Luas Kota makassar (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
040	Rappocini	9,23	5,25
050	Makassar	2,52	1,43
060	Ujung pandang	2,63	1,50
070	Wajo	1,99	1,13
080	Bontoala	2,10	1,19
090	Ujung tanah	5,94	3,38
100	Tallo	5,83	3,32
110	Panakkukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,11
7371	Makassar	175,77	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

1. Perkembangan Penduduk Kota Makassar

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebaliknya.

Berikut data pertumbuhan penduduk di Kota Makassar Periode Tahun 2002-2011:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2002-2011

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase Pertumbuhan (%)
2002	1.148.312	1,59
2003	1.160.011	1,02
2004	1.179.023	1,64
2005	1.193.434	1,22
2006	1.223.540	2,52
2007	1.235.239	0,96
2008	1.253.656	1,49
2009	1.272.349	1,50
2010	1.339.374	1,65
2011	1.352.136	0,95

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar antara lain dipengaruhi oleh posisinya sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan, disamping itu secara geografis Kota Makassar berada pada posisi yang strategis sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia yang berimplikasi pada derasnya arus urbanisasi maupun migrasi masuk dari Kabupaten/Kota lainnya dan Propinsi lain di luar Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

2. Perkembangan Ekonomi Kota Makassar

Kinerja perekonomian Kota Makassar terus memperlihatkan kemajuan yang cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan angka PDRB atas harga berlaku maupun atas harga konstan. Pada tahun 2011, nilai PDRB atas harga berlaku telah mencapai Rp. 43.428.149,52 juta

atau terjadi peningkatan sebesar 17,35 persen bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2010. Demikian juga PDRB dengan harga konstan, pada tahun 2011 telah mencapai Rp. 17.820.697,97 juta atau meningkat 9,55 persen. Bila dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Selatan, PDRB Kota Makassar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sekitar 31,61 persen.

a. Struktur Ekonomi Kota Makassar

Data berikut merupakan struktur ekonomi Kota Makassar periode 2007-2011:

Tabel 4.3 Struktur Ekonomi Kota Makassar 2007-2011 (Dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	0,98	0,90	0,82	0,74	0,67
2	Pertambangan/Pe nggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
3	Industry Pengolahan	23,07	22,24	20,74	19,69	18,90
4	Listrik, Gas, dan Air	2,00	1,93	1,79	1,81	1,76
5	Bangunan	7,68	8,09	7,94	7,83	7,73
6	Perdag, hotel & restoran	28,37	29,05	28,70	29,08	29,43
7	Angkutan dan Komunikasi	15,74	14,80	13,50	14,33	14,36
8	Lembaga Keuangan	10,35	10,09	10,17	10,25	10,85
9	Jasa-jasa	11,60	12,89	13,88	15,26	16,31
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Kalau dilihat peranan setiap sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar, tampak bahwa sektor kegiatan ekonomi yang paling

besar kontribusinya pada tahun 2011 adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant yakni sebesar 29,43 persen. Sementara urutan kedua adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 18,90 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam membahas masalah pertumbuhan ekonomi, maka nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama periode 2002-2011:

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Berdasarkan PDRB Harga Konstan Tahun 2001-2010

Tahun	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2002	8.178.880	7,14
2003	8.882.256	8,60
2004	9.785.333	10,17
2005	10.492.540	7,23
2006	11.341.848	8,09
2007	12.261.538	8,11
2008	13.561 .827	10,52
2009	14.798.187	9,20
2010	16.252.451	9,83
2011	17.820.697	9,65

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

Dari Tabel 4.1.4 di atas diperoleh gambaran umum pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Kota Makassar selama periode tahun 2002-

2011, sangat baik karena selama kurun waktu 10 tahun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 8,85 pertahun. Ini memberikan indikasi besarnya pengaruh perekonomian Kota Makassar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

3. Perkembangan Kesempatan Kerja Kota Makassar

Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja dapat diperoleh melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja. Berikut data kesempatan Kerja di Kota Makassar Periode tahun 2002-2011:

**Tabel 4.5 Data Kesempatan Kerja Kota Makassar
Periode Tahun 2002-2011**

Tahun	Kesempatan Kerja (orang)	Persentase Pertumbuhan (%)
2002	355.770	-
2003	361.961	1.74
2004	404.546	11.76
2005	481.546	19.03
2006	400.980	-16.73
2007	431.981	7.73
2008	498.653	15.43
2009	522.462	4.77
2010	507.962	-2.77
2011	541.050	6.51

Sumber: BPS provinsi Sulawesi Selatan

Dari Tabel 4.2.3 di atas dapat dijelaskan, perkembangan pertumbuhan kesempatan kerja di Kota Makassar pada tahun 2002, yaitu sebesar 355.770 orang Tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 1,74% menjadi 361.961 orang. Pada tahun 2004, meningkat sebesar 11,76% atau sebanyak 404.546 orang. Pada tahun 2005, peningkatan cukup besar yaitu 19,03% atau sebanyak 481.546 orang. Namun tahun 2006, terjadi penurunan sebesar 16,73% yaitu menjadi 400.980 orang. Pada tahun 2007, meningkat kembali menjadi 431.981 orang atau sebesar 7,73%. Tahun 2008 mengalami peningkatan cukup besar yakni 15,43% menjadi 498.653 orang. Tahun 2009, mengalami peningkatan sebesar 4,77% atau sebanyak 522.462 orang. Pada tahun 2010, terjadi penurunan sebesar 507.962 orang atau sebesar 2,77%. Hingga pada tahun 2011 kembali meningkat sebanyak 541.050 orang atau sebesar 3,78%.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di Kota Makassar belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena perkembangan kesempatan kerja di Kota Makassar perkembangannya cenderung bersifat fluktuatif.

4. Perkembangan Investasi Pemerintah Kota Makassar

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana atau barang oleh pemerintah atau pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. investasi pemerintah tercermin dalam belanja modal atau pengeluaran

pembangunan. Berikut data pengeluaran pemerintah Kota Makassar periode tahun 2002-2011 :

**Tabel 4.6 Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2002-2011(Jutaan Rp)**

Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan/ modal	Total Pengeluaran
2002	356.043,45	65.278,96	421.322,41
2003	459965,85	105.816,71	565.782,56
2004	578.174,49	100.638,83	678.813,32
2005	638.382,84	110.426,21	748.809,05
2006	753.568,11	123.329,76	876.897,87
2007	850.467,35	125.498,57	975.965,92
2008	954.288,26	185.705,18	1.139.993,44
2009	1.041.366,89	197.717,39	1.239.084,28
2010	1.304.096,24	176.630,00	1.304.272,87
2011	1.540.493,01	168.460,03	1.708.953,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

5. Perkembangan Investasi Swasta Kota Makassar

Investasi bagi pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi, karena jika hanya mengandalkan investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran saja untuk melaksanakan pembangunan tanpa investasi maka pembangunan akan sulit dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya penambahan faktor-faktor produksi terutama penambahan faktor produksi dan perbaikan faktor produksi tersebut. Penambahan faktor-faktor produksi tersebut dapat melalui penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Berikut ini adalah data perkembangan realisasi investasi di Kota Makassar yang dihitung dari total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan total Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar dari tahun 2002-2011.

**Tabel 4.7 Realisasi Investasi Swasta Di Kota Makassar
2002-2011 (Jutaan Rp)**

Tahun	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Jumlah (Rp)
2002	58.225,95	32.703,30	90.929,25
2003	56.965,65	54.152,50	111.118,15
2004	68.786,46	25.632,30	94.418,76
2005	1.103.567,20	110.534,90	1.214.102,1
2006	305.584,44	33.061,40	338.645,84
2007	2.079.614,43	439.184,08	2.518.798,51
2008	972.089,79	928.375,12	1.900.464,91
2009	142.945,95	195.424,53	338.370,48
2010	32.815,63	1.265.796,08	1.298.611,71
2011	173.422,36	888.289,22	1.061.711,58

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

B. Pengaruh Investasi pemerintah dan swasta terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011

1. Hasil Penelitian

Teknik yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kesempatan kerja di Kota Makassar adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.0. Dalam model analisis regresi linear berganda yang

menjadi variabel terikatnya adalah kesempatan kerja sedangkan variabel bebasnya adalah investasi pemerintah dan investasi swasta.

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, sebagai berikut:

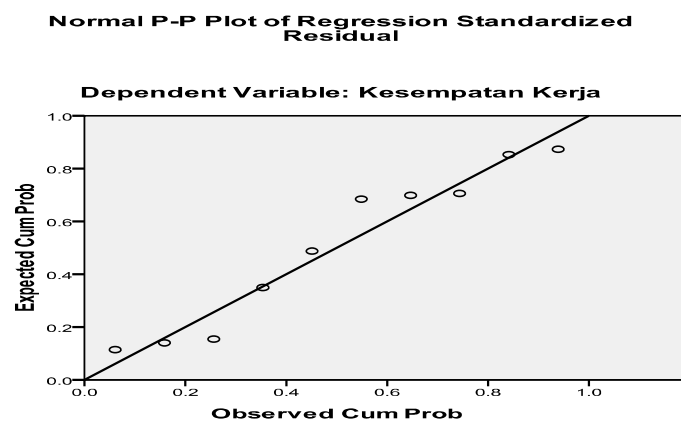
a. Uji Asumsi Klasik

Evaluasi ini dimaksudkan untuk apakah penggunaan model regresi linear berganda (*multiple Regression linear*) dalam menganalisis telah memenuhi asumsi klasik. Model linear berganda akan lebih tepat digunakan dan menghasilkan perhitungan yang lebih akurat apabila asumsi-asumsi berikut dapat terpenuhi yaitu :

1) Uji Normalitas Data

Pengujian Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas



Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kesempatan kerja berdasarkan variabel bebasnya.

2) Uji Linieritas Data

Pada grafik Normal P-Plot of Regretion Stand diatas, terlihat titik-titik (data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier), sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.

3) Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (MULTIKO). Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasi bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

besaran VIF (*variance inflation factor*) dan Tolerance, pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah :

- a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1
- b) Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1

Adapun hasil pengujian teringkas dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Bebas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keputusan terhadap Asumsi Multikolinieritas
Investasi pemerintah (X_1)	0,632	1,583	Terpenuhi
Investasi swasta (X_2)	0,632	1,583	Terpenuhi

Sumber : Output Analisis Regresi

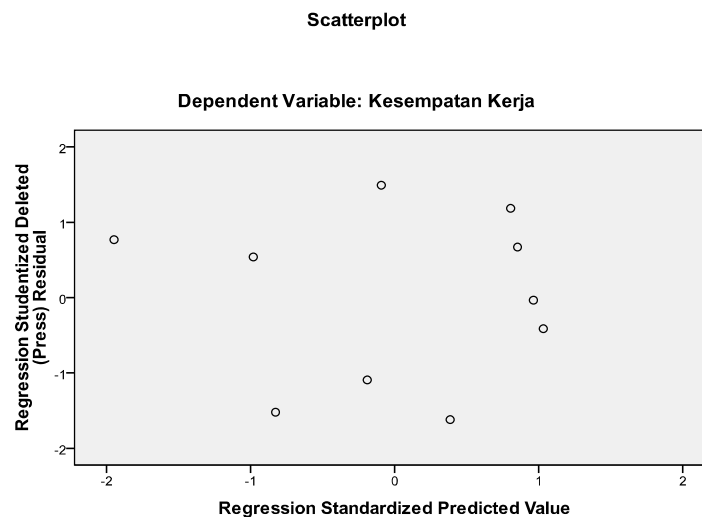
Pada tabel di atas terlihat bahwa kedua variabel bebas memiliki besaran angka VIF di sekitar angka 1 (Investasi pemerintah = 1,583 dan Investasi swasta = 1,583), besaran angka Tolerance semuanya mendekati angka 1 (Investasi pemerintah = 0,632 dan Investasi swasta = 0,632), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas antara kedua variabel bebas dan model regresi layak digunakan

4) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 4.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kesempatan kerja berdasar masukan variabel independent-nya

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan

maupun parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut rekapitulasi hasil analisis regresi berganda :

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T hitung	T tabel	Sig
Investasi pemerintah (X ₁)	0,305	3,195	1,895	0,015
Investasi swasta (X ₂)	0,037	1,381	1,895	0,210
Konstanta	= 8,942			
R	= 0,893			
R square	= 0,798			
Adjusted R Square	= 0,740			
F _{hitung}	= 13,830			
F _{tabel}	= 4,74			
Signifikansi F	= 0,004			

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (*B*) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 8,942 + 0,305 \text{ Investasi pemerintah} + 0,037 \text{ Investasi swasta}$$

1) Koefisien Regresi

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau presentase dari variasi total variabel dependent yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari hasil regresi diatas diperoleh R sebesar 0,893. Hal ini menunjukkan hubungan korelasi positif yang sangat kuat serta eratnya hubungan antara variabel Y dan Variabel X.

2) Uji R Squared (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari hasil regresi di atas nilai *R squared* (R^2) sebesar 0.798, ini berarti 79,8% variasi perubahan variabel kesempatan kerja dapat dijelaskan secara simultan oleh variasi variabel-variabel Investasi pemerintah dan swasta, sisanya sebesar 20,2% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model

3) Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Uji F-statistik di gunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Simultan). pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Jika F-tabel < F-hitung berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika F-tabel > F-hitung berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung 13.830 sedangkan F-tabel = 4,74, sehingga F-hitung > F-tabel (13.830 > 4,74). Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa F hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Investasi Pemerintah (x_1) dan Investasi Swasta (x_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar pada tingkat signifikan 5%.

4) Pengaruh Secara Parsial

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi, diperoleh hasil Variabel Bebas yaitu Investasi pemerintah (X_1) dan Investasi swasta (X_2) terhadap variabel Kesempatan kerja (Y) secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Investasi pemerintah (X_1)

Hipotesis pengaruh variabel Investasi Pemerintah terhadap variabel Kesempatan kerja Di Kota makassar yang digunakan adalah:

$H_o : \beta_1 < 0$, berarti variabel Investasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel Kesempatan Kerja.

$H_a : \beta_1 > 0$, berarti Investasi Pemerintah berpengaruh terhadap variabel Kesempatan kerja.

Hasil perhitungan yang didapat adalah T-hitung $x_1 = 3.196$ sedangkan T-tabel $= 1,895$ (df (n-k) = 7, $\alpha = 0,05$), sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3.196 > 1,895$) dan probabilitas signifikan sebesar 0,015. Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel yang menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yang menunjukkan investasi pemerintah signifikan, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Investasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar. Dengan nilai t-sebesar 3.196 dan nilai koefisien sebesar 0.305 (positif), menyatakan bahwa setiap 1% peningkatan Jumlah Investasi Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan Kesempatan Kerja Di Kota Makassar sebesar 0.305 % , dan sebaliknya 1% penurunan jumlah Investasi Pemerintah akan menurunkan pertumbuhan Kesempatan Kerja sebesar 0.305 %.

b) Investasi swasta (X_2)

Hipotesis pengaruh variabel Investasi swasta terhadap variabel Kesempatan kerja di Kota Makassar yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_2 < 0$, berarti variabel Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja.

$H_a : \beta_2 > 0$, berarti Investasi swasta berpengaruh terhadap variabel Kesempatan Kerja

Hasil perhitungan yang didapat adalah $t\text{-hitung} = 1.381$ sedangkan $t\text{-tabel} = 1.895$ ($df (n-k) = 7, \alpha = 0,05$), sehingga $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$ ($1.381 < 1.895$). Perbandingan antara $t\text{-hitung}$ dengan $t\text{-tabel}$ yang menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yang menunjukkan investasi swasta tidak signifikan, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kesempatan kerja di Kota Makassar. Dengan nilai t - sebesar 1.381 dan nilai koefisien sebesar 0.037 (positif), menyatakan bahwa setiap 1% peningkatan investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja di Kota Makassar sebesar 0,037%, dan sebaliknya 1% penurunan investasi swasta akan menurunkan pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 0.037%.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh secara simultan

Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh bahwa investasi pemerintah dan swasta berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011 dimana nilai $F_{hitung} (13,830) > F_{tabel} (4,74)$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa investasi pemerintah dan swasta bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar 2002-2011.

Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena

mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dan meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.⁵⁹

hubungan investasi pemerintah khususnya belanja modal atau pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja yaitu dilihat dari sisi usaha menarik investor asing untuk menanamkan modal sehingga dapat meningkatkan investasi swasta, maka dari itu investasi pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta selanjutnya akan mendorong terciptanya lapangan usaha yang sekaligus dapat meningkatkan kesempatan kerja.⁶⁰

b. Pengaruh secara parsial

1) Investasi Pemerintah terhadap kesempatan kerja

Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif (sesuai teori) dan signifikan terhadap kesempatan kerja periode tahun 2002-2011 dimana $T_{hitung} (3,196) > T_{tabel} (1,895)$. Hasil ini sesuai hipotesis bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011.

⁵⁹Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 121.

⁶⁰M. Suparmoko dan Irawan, *op.cit.*, h. 95.

Secara teori hubungan investasi pemerintah dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi.⁶¹ Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat.

Hasil ini juga sesuai dengan temuan Try Wahyuningsih dengan menggunakan variabel-variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2) Investasi Swasta terhadap kesempatan kerja

Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa investasi swasta berpengaruh positif (sesuai teori) namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja periode tahun 2002-2011 dimana $T_{hitung} (1,381) < T_{tabel} (1,895)$. Hasil ini tidak sesuai hipotesis bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011.

Secara teori, Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

⁶¹Mulyadi S, *op.cit.*, h. 8.

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat⁶². Namun di Kota Makassar pada periode 2002-2011 investasi swasta tidak berpengaruh signifikan. Hal itu dapat dilihat dari nilai investasi swasta (PMA dan PMDN) di Kota Makassar periode 2002-2011 yang berfluktuatif yang artinya nilai investasi swasta tidak stabil. ini disebabkan karena iklim investasi di Kota Makassar yang kurang kondusif.

Survei yang dilakukan bank Indonesia di Sulawesi Selatan yang mengambil 3 sampel daerah yaitu, Makassar, Pare-pare dan Bone bahwa terdapat beberapa faktor non ekonomi yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif, diantaranya di pengaruhi kestabilan politik, penegakan hukum, pertanahan, kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa, komitmen pemerintah, layanan perbankan, dukungan infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah.⁶³

Padahal, suatu iklim investasi yang baik maka akan semakin menarik daerah tersebut untuk dijadikan investasi bagi perusahaan-perusahaan swasta. salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah investasi, baik investasi dari luar negeri maupun investasi dalam negeri.⁶⁴

Hasil ini sesuai dengan temuan hendarmin dengan menggunakan variabel-variabel belanja modal, investasi swasta,

⁶²Hadi Sasana, *op.cit.*, h. 3.

⁶³Bank Indonesia, “*Survei faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi iklim investasi di Sulawesi Selatan*”, Survei iklim investasi, h. 34, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B8BE963C-A388-47CD-9ABE-5ED0ED2E0F21/10898/Boks1.pdf> (di akses 18 Agustus 2013).

⁶⁴Try Wahyuningsih, *op.cit.*, h. 3.

pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian investasi swasta terhadap kesempatan kerja juga menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, investasi pemerintah dan swasta berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar Periode tahun 2002-2011. Secara Parsial, investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah akan menyebabkan peningkatan kesempatan kerja di Kota Makassar. Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar periode tahun 2002-2011. Pengaruh positif dan tidak signifikan menunjukkan bahwa peningkatan investasi swasta akan menyebabkan peningkatan kesempatan kerja di Kota Makassar walaupun peningkatan itu tidak signifikan (nyata).

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Melihat pengaruh investasi pemerintah terhadap kesempatan kerja yang besar, diharapkan pemerintah meningkatkan porsi pengeluaran pembangunan atau belanja modal pemerintah dan disarankan pengeluaran atau belanja modal tersebut hendaknya ditujukan pada peningkatan pembangunan dan prasarana publik agar menjadi penunjang dalam

lancarnya kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal. Apabila sarana dan prasarana serta infrastruktur telah terkelola dengan baik maka investor akan merasa aman dan tertarik menanamkan modalnya sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja di Kota Makassar.

2. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi swasta, sebab investasi sektor swasta lebih banyak memiliki potensi dalam menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan untuk mengairahkan iklim investasi antara lain seperti, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, pengaturan terhadap pajak, dan memberikan rasa aman bagi penanam modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. *Refleksi Dan Gagasan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, “*Statistik Indonesia*”. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=15 (5 Mei 2013).
- Bank Indonesia, “*Survei faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi iklim investasi di Sulawesi selatan*”, Survei iklim investasi, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/B8BE963C-A388-47CD-9ABE-5ED0ED2E0F21/10898/Boks1.pdf> (di akses 18 Agustus 2013).
- Bank Indonesia. “*Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC759858774DF852/17683/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf> (4 mei 2013).
- Blomstrom, Magnus., Robert, E, Lipsey. “Is Fixed Investment The Key To Economic Growth”. Working Paper, Massachusett. Avenue Cambridge, 1993.
- BR, Afrida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Chandra, Eddy Wibowo. “*Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-201*”. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/147/113> (5 mei 2013).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah 2009
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Hendarmin, “ Pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat” , [http://repository. polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/](http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/) (di akses 15 Juni 2013).
- Hoolis B. Chenery and Nicholas G. Carter, “Foreign Assistance and Development Performance 1960-1970”, *American Economic Review*, Vol. 63, No.2 Mei, 1973.

- Irawan, M. Suparmoko. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE, 2002.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lusiana. *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- M, Simom Tomam. "Pengaruh PDRB, Inflasi Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara". <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26484/4/Chapter%20II.pdf> (6 Mei 2013).
- Mangkoesoebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*. Jakarta : BPFE UGM, 2008.
- Pemerintah Kota Makassar, "Invesment Guidelines Kota Makassar". http://makassarkota.go.id/download/investment_guideline_makassar.pdf (1 mei 2013).
- Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008. "Tentang Investasi Pemerintah". <http://www.setjen.depkeu.go.id/detail.php?module=layanan&act=investasi&div=dasar>, (3 mei 2013).
- Putong dan Nuring Indah Andjaswa, Pengantar ekonomi makro. Jakarta: Mitra wacana media, 2010.
- Rachman, Edyan "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Di DKI Jakarta", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4100/1/05011102.pdf> (diakses 13 Juli 2013)
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hadi Sasana, " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Jawa tengah," *JEJAK*, vol . 1 no. 1 (September 2008), h. 3. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/download/1445/1571> (Diakses 6 April 2013).
- Suandi hamid, Edy "Kontroversi Angka Pengangguran dan Kemiskinan". http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul42_1.htm (5 mei 2013).
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sumarsono, Sonny. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

The World Bank. *World Development Report: A Better Investment Climate for Everyone*. Washington, DC. Oxford University Press, 2004.

Tiro, Muhammad Arif *Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher, 2009.

Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2000.

_____.dan Stephen C. Smith, *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003

Wahyuningsih, Try. “*Dampak investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku*”,<http://ejournal.uin.malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2129/ps> (diakses 15 Juni 2013).

Yuliana, Indah. “*Investasi Dalam Perspektif Islam*”. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/309/ps_196 (10 mei 2013).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Kesempatan kerja, Investasi pemerintah dan swasta

Kota makassar 2002-2011

Tahun	Kesempatan Kerja (orang)	Investasi Pemerintah (Jutaan Rp)	Investasi Swasta (Jutaan Rp)
2002	355.770	65.278,96	90.929,25
2003	361.961	105.816,71	111.118,15
2004	404.546	100.638,83	94.418,76
2005	481.546	110.426,21	1.214.102,1
2006	400.980	123.329,76	338.645,84
2007	431.981	125.498,57	2.518.798,51
2008	498.653	185.705,18	1.900.464,91
2009	522.462	197.717,39	338.370,48
2010	507.962	176.630,00	1.298.611,71
2011	541.050	168.460,03	1.061.711,58

Hasil Logaritma Natural (LN)

Tahun	Kesempatan Kerja (orang)	Investasi Pemerintah (Jutaan Rp)	Investasi Swasta (Jutaan Rp)
2002	12,78	11,09	11,42
2003	12,80	11,57	11,62
2004	12,91	11,52	11,46
2005	12,08	11,61	14,01
2006	12,90	11,72	12,73
2007	12,98	11,74	14,74
2008	13,12	12,13	13,92
2009	13,17	12,19	12,73
2010	13,14	12,08	14,08
2011	13,20	12,03	13,88

HASIL REGRESI LINIER BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kesempatan Kerja	13.0080	.15426	10
Investasi Pemerintah	11.7693	.34590	10
Investasi Swasta	13.0576	1.23475	10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.893 ^a	.798	.740	.07861	.798	13.830	2	7	.004

a. Predictors: (Constant), Investasi Swasta, Investasi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kesempatan Kerja

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.171	2	.085	13.830	.004 ^a
	Residual	.043	7	.006		
	Total	.214	9			

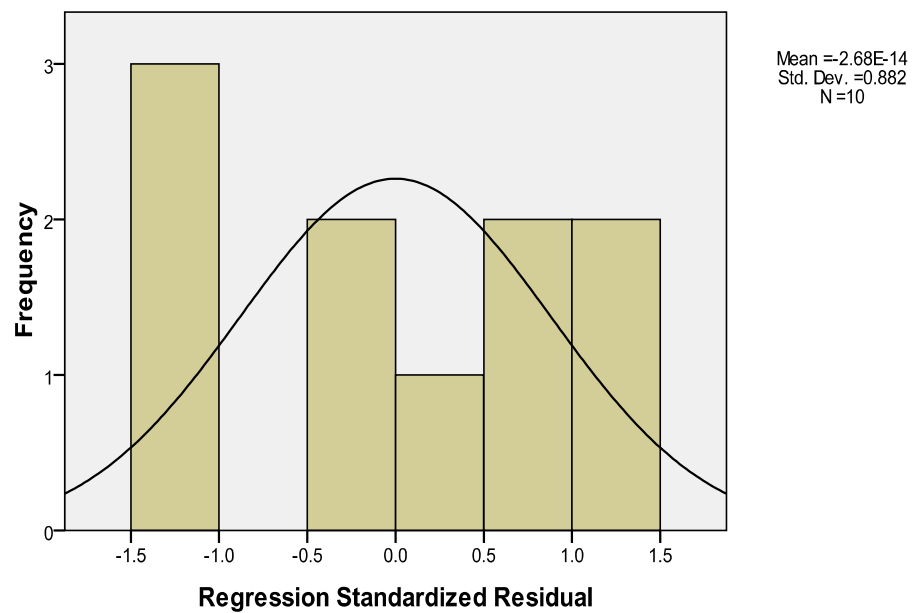
a. Predictors: (Constant), Investasi Swasta, Investasi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kesempatan Kerja

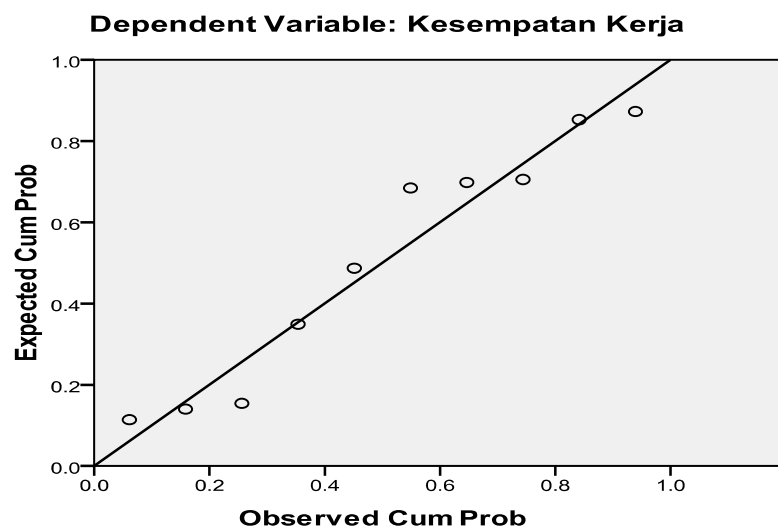
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.942	.952		9.396	.000		
Investasi Pemerintah	.305	.095	.683	3.195	.015	.632	1.583
Investasi Swasta	.037	.027	.295	1.381	.210	.632	1.583

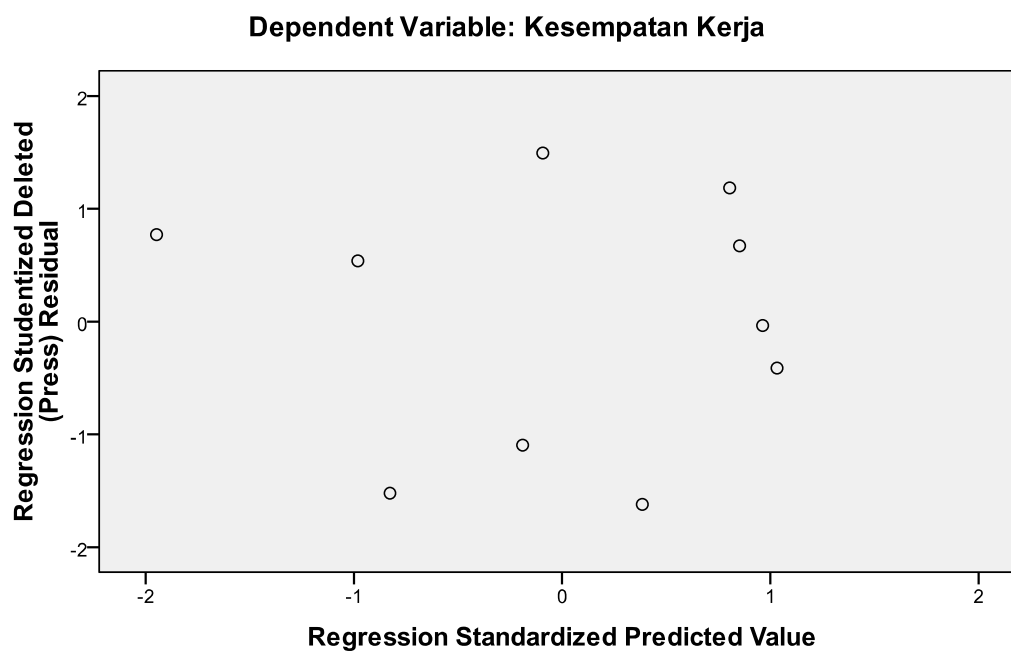
a. Dependent Variable: Kesempatan Kerja

Histogram**Dependent Variable: Kesempatan Kerja**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ARIF JATMIKO, Lahir di Sragen pada tanggal 15 Juni 1991. Penulis adalah putra pertama dari pasangan Giyono dan Marmini. Penulis memulai jenjang pendidikan TK Taman Kanak-kanak Kumara Jaya, pada tahun 1996 hingga tahun 1997. Penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri Centre Mawang sampai tahun 2003. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri 01 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan studi SMA Negeri 01 Bontomarannu dan lulus tahun 2009. Penulis melanjutkan studi tahun 2009 dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.